

## ABSTRAK

Pada perkembangannya dalam hal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT pihak debitur tidak dapat hadir yang kemudian diwakilkan oleh pihak perwakilannya, konsekuensi dari perwakilan debitur tersebut maka APHT harus dibuat dengan SKMHT atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Adapun SKMHT yang ada dibuat oleh Notaris. Namun pada perkembangannya berdasarkan Pasal 96 PMNA/ Per.Kaban No. 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Per.Kaban No. 8 Tahun 2012 mengharuskan akta yang dibuat sesuai dengan formulir atau form yang dibuat oleh BPN atau Badan Pertanahan, padahal hal tersebut jelas telah bertentangan dengan ketentuan terkait akta menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 kurang tepat, hal ini dikarenakan Notaris berwenang membuat akta autentik, bukan membuat surat, atau mengisi blanko, seperti SKMHT yang mana naskahnya dibuat oleh BPN. Sehingga jelaslah bahwa SKMHT saat ini telah bertolak belakang dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini ialah 1) bagaimanakah pelaksanaan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di Pemalang saat ini? 2) apasajakah persoalan yang terdapat dalam pelaksanaan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di Pemalang saat ini? 3) bagaimanakah pelaksanaan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di Pemalang yang seharusnya? Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah yuridis sosiologis. Adapun hasil dari penelitian tesis ini ialah adanya disharmonisasi antara ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 96 ayat (1) Per.Kaban No. 8 Tahun 2012. Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya persoalan dalam pembuatan SKMHT ialah berupa faktor peraturan perundang-undangan yaitu berupa disharmonisasi antara Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 96 ayat (1) Per.Kaban No. 8 Tahun 2012, faktor kelemahan SKMHT yaitu berupa masa berlakunya SKMHT dan biaya tambahan dalam pembuatan SKMHT yang juga merupakan akte notaris.

Kata Kunci: Kedudukan, Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan, Notaris

## ABSTRACT

In its development in terms of making the Deed of Granting Mortgage or APHT the debtor can not be present which is then represented by his representative, the consequences of the debtor's representative then the APHT must be made with SKMHT or Power of Attorney Imposing Mortgage Rights. The SKMHT is made by a notary public. But in its development based on Article 96 PMNA / Per.Kaban No. 3 of 1997 as amended by Regulation No. 8 of 2012 requires that the deed is made in accordance with the form or form made by the BPN or the Land Agency, even though it is clear that it has contradicted the provisions related to the deed according to Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 is not quite right, this is because The notary is authorized to make an authentic deed, not to make a letter, or fill in blanks, such as SKMHT where the manuscript is made by BPN. So it is clear that the current SKMHT is contrary to the provisions referred to in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014. The formulation of the problem to be discussed in this thesis is 1) how the implementation of the Power of Attorney Imposing Mortgage Rights in Pemalang when this? 2) what are the problems that exist in the implementation of making Power of Attorney Imposing Mortgage in Pemalang at this time? 3) how does the implementation of the Power of Attorney Imposing Underwriting Rights in Pemalang should be? This type of research used in this thesis is sociological juridical. The result of this thesis research is the disharmony between the provisions of Article 38 of the Notary Position Law and Article 96 paragraph (1) of Law No. 8 of 2012. As for the factors that influence the emergence of problems in making SKMHT is in the form of laws and regulations, namely in the form of disharmony between Article 38 of the Notary Position Law and Article 96 paragraph (1) of Law No. 8 of 2012, the weakness of SKMHT is the form of validity of SKMHT and additional costs in making SKMHT which is also a notarial certificate.

Keywords: Position, Power of Attorney Imposing Mortgage Rights, Notary Public